

HASIL CEK_PENDAMPINGAN
PENGEMBANGAN SISTIM
MANAJEMEN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
(SMK3) DI DESTINASI WISATA
TAMAN TEBING BREKSI, D.I.
YOGYAKARTA(1)

by Helifi Agustin 197408152005012003

Submission date: 14-Jan-2021 08:19AM (UTC+0700)

Submission ID: 1487183799

File name: 12012021_Artikel_Pengabmas_Breksi_Jurnal_MARTABE_1_1.pdf (427.49K)

Word count: 2849

Character count: 18381

**PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN ¹SISTIM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DI DESTINASI
WISATA TAMAN TEBING BREKSI, D.I. YOGYAKARTA**

Helfi Agustin, Machfudz Eko Arianto, Muchamad Rifai

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan,
e-mail:helfi.agustin@ikm.uad.ac.id.

Abstract

In general, law enforcement on occupational safety and health (OSH) has not been well implemented in the non-formal sector. One of them is community-based tourism. The obstacles include the absence or not yet functioning of OSH institutions. In fact, the tourism industry can easily sink due to tourists' discomfort and insecurity due to disease outbreaks, natural disasters, and accidents. The purpose of community service is to assist in developing the OSH Management System at Tebing Breksi. This community service will contribute to the internalization of everyone's OSH culture at Tebing Breksi that will impact the recovery of tourism sector after the Covid-19 pandemic. The implementation method is through the advocacy approach, outreach, and assisting of the OSH program. The result of community service is top management policies in OSH commitment, organizational structure (the committee in charge of OSH), and hazard identification training as a requirement for making SOPs. The sustainability of the OSH management system will encourage the realization of a OSH culture for every worker in tourism services.

Keywords: OSH management system, OSH, consultant, Sapta pesona, Tourism

Abstrak

Penegakan hukum ⁴Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara umum belum terselenggara dengan baik di sektor non formal. Salah satunya adalah industri pariwisata yang dikelola oleh masyarakat. Penghambatnya antara lain karena belum ada/berfungsinya kelembagaan K3 dalam manajemen usaha. Padahal industri pariwisata dapat dengan mudah terpuruk karena ketidaknyamanan dan tidak aman bagi wisatawan, akibat wabah penyakit, bencana alam dan kecelakaan di destinasi wisata. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melakukan pendampingan/konsultan dalam pengembangan Sistim Manajemen K3 di Tebing Breksi. Pengabdian kepada masyarakat ini akan memberi sumbangan pada terinternalisasinya budaya K3 pada setiap insan di Tebing Breksi dan terwujudnya sapta pesona sehingga berdampak pada pemulihan sektor wisata Tebing Breksi pasca pandemic covid-19. Metode pelaksanaan pengabdian adalah pendekatan advokasi, sosialisasi dan konsultan/fasilitator program K3. Hasil pengabdian adalah kebijakan manajemen puncak dalam bentuk komitmen K3, terbentuknya struktur penanggung jawab K3 (P2K3), dan pelatihan identifikasi bahaya sebagai syarat pembuatan SOP. Harapannya keberlanjutan SMK3 akan menjadi budaya bagi setiap pekerja di layanan wisata.

Kata Kunci: SMK3, budaya K3, Pendampingan, Sapta pesona, Pariwisata

PENDAHULUAN

Penyebab kecelakaan dan penyakit akibat kerja sering dikaitkan dengan kondisi yang tidak aman dan perilaku yang tidak aman saat bekerja. Salah satu upaya pembentukan sikap dan perilaku aman dan sehat kepada pekerja adalah dengan membangun budaya keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Konradus 2006).

Budaya K3 merupakan suatu konsep yang menyangkut aspek internal dan eksternal manusia terdiri dari 1). perilaku yang tidak dapat diamati (*mind*) yakni nilai – nilai dan persepsi K3 dari setiap pekerja, 2). perilaku yang dapat diamati (*behavior*) yaitu aspek praktik dalam K3 dan 3). aspek organisasi/manajemen K3 yakni lingkungan yang menjadi kehidupan social pekerja karena individu merupakan bagian dari masyarakat pekerja yang berhimpun dalam wadah organisasi. Ketiga aspek ini saling berinteraksi dan berkaitan satu sama lain mempengaruhi perilaku pekerja. Ketiganya juga menjadi indikator penting sebagai bagian dari budaya organisasi di sebuah perusahaan. Proses perwujudan budaya K3 dapat dilakukan dengan pendekatan dalam organisasi yakni melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. (Konradus 2006).

Secara politis, ideologis dan hukum, perlindungan kolektif pekerja oleh Negara telah dituangkan ke dalam (UU no 1 tahun 1970) tentang Keselamatan Kerja, yang diperkuat dengan PP no. 50 tahun 2012 tentang SMK3. Namun penegakan hukum K3 secara umum belum terselenggara dengan baik di semua sector usaha terutama di tempat kerja sektor non formal (Puspita Panjrah Sumekar dkk, 2017)

Salah satu sektor non formal yang belum terjamah oleh K3 adalah industri pariwisata yang dikelola oleh masyarakat, dikenal dengan kelompok sadar wisata (pokdarwis). Kendala yang menghambat penegakan hukum K3 di industry pariwisata yang dikelola masyarakat ini

diantaranya karena belum ada/berfungsinya lembaga K3 di wilayah tersebut, kurangnya kader-kader K3, kurangnya rasa kemitraan antara pengusaha dan pekerja dan budaya K3 belum sepenuhnya dihayati oleh pengusaha dan pekerja terutama pada usaha kecil dan menengah karena menganggap bahwa penerapan norma K3 berarti bertambahnya biaya (*cost*) produksi (Konradus 2006). Kondisi ini kontradiktif dengan kerentanan industri pariwisata terhadap kejadian wabah penyakit, bencana alam dan kecelakaan. Sebuah tempat wisata dapat dengan mudah terpuruk karena *image* ketidaknyamanan dan ketidakamanan yang dirasakan oleh wisatawan (Bae and Chang 2020; Gössling, Scott, and Hall 2020; Tiwari, Séraphin, and Chowdhary 2020).

Proses pemulihan image terhadap objek wisata biasanya memakan waktu cukup lama. Hal tersebut dirasakan pula oleh kelompok sadar wisata dan pengelola Taman Tebing Breksi pada saat kejadian pandemic covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020. Peristiwa pandemic covid-19 semakin membangkitkan kesadaran pengelola mengenai pentingnya penerapan upaya keselamatan dan kesehatan kerja di tempat wisata. Pengabdian kepada masyarakat ini akan berimplikasi terhadap sapta pesona dan pemulihan sektor wisata pasca pandemic covid-19.

Secara konseptual, pengembangan budaya Keselamatan dan kesehatan dapat dilakukan dengan pembentukan sistem manajemen K3 (SMK3). Sistem ini seharusnya menjadi bagian yang melekat dalam manajemen organisasi. Masalah yang dimiliki organisasi Taman Tebing Breksi adalah: belum dipahaminya secara komprehensif pentingnya keberadaan SMK3 yang melekat dalam manajemen organisasi, pimpinan pengelola belum menghayati benar tugasnya sebagai penanggung jawab keselamatan dan kesehatan seluruh pekerja dan wisatawan yang berkunjung, pengelola bingung bagaimana memulai pengembangan SMK3 di objek wisata, sehingga pendampingan

dari konsultan dari ahli K3 dibutuhkan untuk mengembangkan SMK3 dan menerapkan program secara berkesinambungan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim merupakan kegiatan pengembangan masyarakat partisipatif yaitu dengan melakukan pemberdayaan dalam bentuk fasilitasi/pendampingan pengembangan SMK3 terhadap tim pengelola Taman Tebing Breksi. Metode pelaksanaan pengabdian terdiri atas: 1. pendekatan advokasi terhadap pimpinan pengelola Tebing Breksi dan ketua Pokdarwis, 2. Sosialisasi kepada tim pengelola Tebing Breksi 3. Fasilitasi/pendampingan kepada penanggung jawab program K3.

Ciri penyelenggaraan promosi budaya K3 ini bertumpu pada partisipasi aktif dan kerja sama interaktif antara pengabdian sebagai penyelenggara program promosi budaya K3 dengan pengelola Tebing Breksi sebagai sasaran pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di objek wisata Taman Tebing Breksi, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan dilaksanakan pada Maret sampai dengan Desember 2020. Kerja sama pengabdian kepada masyarakat dan penelitian antara pengabdian dengan pengelola telah dilakukan sejak tahun 2018, tahun ini keberlanjutan kerja sama semakin diteguhkan dengan kesepakatan pengembangan SMK3. Hasil pengabdian adalah sebagai berikut:

1. Hasil advokasi

Advokasi diartikan sebagai upaya persuasi yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi tindak lanjut mengenai sesuatu hal. Advokasi dalam bidang kesehatan bertujuan untuk memperoleh pembelaan, bantuan, dukungan terhadap program kesehatan (Notoatmodjo, 2007).

Advokasi secara umum merupakan bentuk komunikasi dari pihak yang lemah kepada yang memiliki kekuasaan. Dalam hal ini adalah antara pengabdian dengan pimpinan puncak pengelola Tebing Breksi. Tujuannya adalah keselamatan dan kesehatan pekerja dan wisatawan lebih menjadi perhatian bagi pimpinan.



Gambar 2. Advokasi dengan suasana informal untuk komitmen K3

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, pengabdian mengadvokasi pimpinan pengelola Tebing Breksi dan ketua kelompok wisata (pokdarwis) dalam rangka memberikan pembelaan hak keselamatan dan kesehatan pekerja dan wisatawan selama berada di tempat kerja dan menjadi tanggung jawab pengelola Tebing Breksi. Akan tetapi strategi persuasi tidak membicarakan hak sehat dan selamat pada pekerja, akan tetapi bagaimana efek rasa aman dan rasa nyaman yang dirasakan oleh wisatawan Tebing Breksi. Rasa aman dan nyaman yang merupakan bagian dari Sapta Pesona akan menimbulkan efek kepuasan bagi wisatawan sehingga menimbulkan kesan baik dan keinginan untuk kembali.

Wisatawan yang merasa puas juga akan mempromosikan Tebing Breksi ke orang lain sehingga semakin banyak wisatawan yang datang (pemasaran dari mulut ke mulut), yang saat ini semakin dimudahkan dengan adanya media sosial. Strategi advokasi yang mengemukakan pelayanan kepada konsumen ini menarik minat ketua pengelola tentang SMK3 sehingga pada akhirnya menyatakan kesediaannya menandatangani pernyataan

komitmen pengembangan SMK3.

Teknik advokasi yang digunakan adalah bincang-bincang informal dengan ketua pengelola untuk menyampaikan pentingnya membentuk kebijakan K3 dan melakukan tinjauan awal kondisi K3 (Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 tentang SMK3).

Hasilnya adalah pucuk pimpinan bersedia membuat dan menandatangani kebijakan serta menetapkan satu personel penanggung jawab yang memiliki kewenangan dalam mengkoordinasikan program K3 di Tebing Breksi. Pucuk pimpinan juga menginstruksikan untuk mengadakan rapat sosialisasi komitmen.

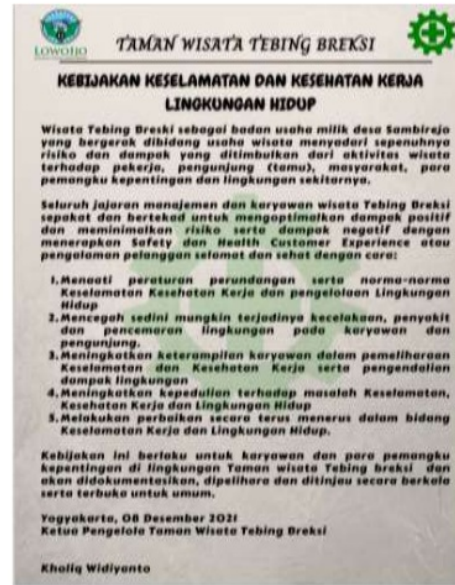
Setelah persetujuan tersebut, pengabdian sebagai konsultan melakukan pendampingan terhadap penanggung jawab K3 yang telah ditunjuk untuk melakukan tinjauan awal kondisi K3.



Gambar 1. Identifikasi Bahaya sebagai bentuk peninjauan awal kondisi K3

Persyaratan utama dalam SMK3 adalah membuat kebijakan K3. SMK3 tidak akan berjalan tanpa adanya Kebijakan K3 yang ditetapkan oleh pucuk pimpinan (Fitriana dan Wahyuningsih, 2017). Maksudnya adalah jika pucuk pimpinan selaku pemegang kekuasaan tertinggi menyadari pentingnya menerapkan K3 dan memiliki komitmen yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk kebijakan maupun dengan keteladanan, maka seluruh sumber daya yang dibutuhkan, bagi pengembangan penerapan K3 dalam organisasi akan dapat terpenuhi. Selanjutnya upaya pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan struktur

organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja akan dapat dijalankan. Akhirnya akan tercipta tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Sukpto, 2013)

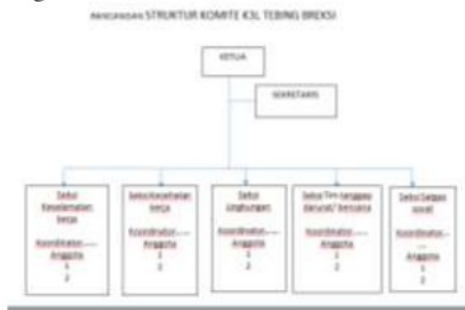


Gambar 3. Kebijakan K3 di tanda tangani pucuk pimpinan

Tahapan selanjutnya adalah pembentukan struktur organisasi Panitia Pembina Keselamaan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Menurut (Permenaker nomor 4 tahun 1987), P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Syarat pembentukan organisasi tersebut adalah jika sebuah industri memiliki 100 orang pekerja/lebih atau industri yang mempekerjakan kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran,

keracunan dan penyinaran radioaktif.

Berdasarkan informasi yang tim pengabdian peroleh bahwa di tempat wisata Tebing Breksi terdapat 120 pekerja. Oleh karena itu pembentukan organisasi P2K3 adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Terkait hal ini, tim pengabdian melakukan pendampingan dalam pembentukan organisasi P2K3.



Gambar 4. Rancangan Organisasi P2K3 di Tebing Breksi

Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha (pucuk pimpinan) dan pekerja yang susunannya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota (Permenaker nomor 4 tahun 1987)

Selain penetapan kebijakan dan pembentukan organisasi. Hal yang penting lainnya adalah penyediaan anggaran, sarana prasarana dan tenaga kerja yang diperlukan dalam bidang K3, serta agenda pertemuan perencanaan K3 yang terkoordinasi, termasuk melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3 dikomunikasikan secara bertahap dengan ketua pengelola melalui wakil dan penanggung jawab K3.

2. Sosialisasi Kebijakan K3

Setelah penunjukan penanggung jawab K3 oleh ketua pengelola, maka sosialisasi tentang kebijakan dilakukan. Kebijakan K3 harus dinyatakan dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca oleh semua pihak baik manajemen puncak, para pekerja di semua bagian, bahkan wisatawan. Kebijakan pimpinan dibuat dalam bentuk poster kemudian dibingkai dengan pigura dan dipasang pada beberapa

titik agar dapat diketahui, dipelajari, dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh staf dan karyawan perusahaan.

Sosialisasi komitmen K3 merupakan upaya komunikasi untuk mendiseminasikan komitmen pimpinan terhadap penerapan SMK3 ke semua arah. Tujuan dilakukannya sosialisasi komitmen adalah agar semua pekerja/pengelola siap memberikan dukungan. Sosialisasi kebijakan K3 juga dilakukan melalui rapat dan pertemuan dengan tim kecil oleh penanggung jawab K3, wakil ketua dan beberapa pekerja yang mewakili bagiannya. Maksud diadakannya sosialisasi komitmen K3 ini adalah agar seluruh pekerja Tebing Breksi mengetahui bahwa tanggung jawab dalam penerapan Sistem Manajemen K3 bukan urusan bagian K3 saja. Tetapi mulai dari manajemen puncak sampai karyawan terendah. Selain itu perwakilan dari setiap bagian akan diminta keterlibatannya sebagai panitia pengurus keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3).



Gambar 5. Proses sosialisasi SMK3

3. Fasilitasi/pendampingan

Tugas fasilitasi atau pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian pada dasarnya adalah sebagai seorang konsultan bidang K3. Penanggung jawab K3 yang ditunjuk adalah seorang pekerja dari kantor dan belum memiliki sertifikat keahlian K3, oleh sebab itu tim melakukan pendampingan, peningkatan kapasitasnya dalam K3.

Tugas seorang penanggung jawab K3 bukanlah tugas yang mudah. Penanggung jawab K3 bertanggung jawab untuk mempromosikan standar Sistem Manajemen K3 secara menerus baik di unit kerjanya sendiri

maupun di unit kerja lain secara konsisten serta bersama-sama memelihara penerapan sistemnya, mengidentifikasi bahaya dan mengendalikan risiko, serta menjadi tempat konsultasi dalam pembuatan SOP oleh rekannya dari berbagai bagian.

Secara teoritis kegiatan yang perlu direncanakan secara rutin untuk menjalankan SMK3 secara komprehensif terdiri atas : Inspeksi K3; safety/health talk; identifikasi bahaya dan pengendalian risiko untuk mencegah kecelakaan; membuat SOP; peyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan sarana K3; simulasi dan diklat; audit K3; pencatatan dan pelaporan kecelakaan; persiapan kondisi darurat; penyediaan Faskes & P3K; implementasi pencegahan Covid-19 dan penyakit lainnya; inspeksi sanitasi untuk memastikan kuliner yang sehat; promosi kesehatan seperti pengumuman di mikrofon dan spanduk; briefing .

Dalam tahun ini belum seluruh kegiatan direncanakan dan atau dilaksanakan, akan tetapi sebagian besar sudah menjadi program dalam SMK3 Tebing Breksi. Implementasi kegiatan SMK3 yang telah dilaksanakan yaitu pembentukan struktur Panitia Pelaksana K3 (P2K3), penyediaan fasilitas kesehatan, penyediaan APD berupa tali pengaman (*safety belt*) pada saat membersihkan kerikil yang membahayakan pengunjung di dinding tebing, helm bagi pengendara dan pengunjung wisata jeep *shiva plateu*, masker, *face shield* dan sarung tangan sebagai implementasi upaya pencegahan covid-19.



Gambar 5. Pendampingan melakukan identifikasi bahaya untuk persiapan membuat SOP

XXXXXX



Gambar 6. inspeksi K3 di bagian ticketing

Pengelola Tebing Breksi juga sudah melaksanakan implementasi pencegahan covid-19 dengan menyediakan 60 buah bak cuci tangan dan sabun yang diletakkan pada titik-titik tertentu, membuat standar pelaksanaan prosedur, dan pelatihan manajemen risiko K3. Tebing Breksi juga telah memasang spanduk pencegahan covid-19, rambu K3 dan melaksanakan promosi K3 dengan mengumumkan melalui mikrofon jika ada perilaku bahaya pengunjung yang *selfie* di pinggir atau naik ke pagar Tebing atau tidak memakai masker atau terkait dengan himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya.



Gambar 7. penyediaan fasilitas CTPS sebagai implementasi pencegahan covid-19

Kegiatan promosi keselamatan dan kesehatan kerja juga dilakukan dalam bentuk penyuluhan (gerakan pemberdayaan) sebagai bentuk sosialisasi kebijakan, agar tidak hanya pimpinan yang berkomitmen akan tetapi semua pemegang kepentingan seperti pekerja, wisatawan memiliki komitmen dan tekad yang sama untuk menerapkan K3 di Tebing Breksi.

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan beberapa cara, misalnya melalui

keteladanan dalam keselamatan dan pernyataan komitmen manajemen, melalui himbauan dengan loudspeaker, tertulis pada poster dan spanduk, *safety sign* (rambu peringatan K3) serta saat pelaksanaan kegiatan audit, monitoring dan evaluasi, atau inspeksi K3 termasuk penyediaan saran dan fasilitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja menjadi lebih baik seperti penyediaan tempat untuk cuci tangan, air yang mengalir serta sabun (Green and CL 1982).



Gambar 8. *safety sign* yang dipasang pada pagar Tebing tempat wisatawan sering melakukan *selfie*

Program K3 yang belum dilaksanakan adalah audit K3; pencatatan dan pelaporan kecelakaan; persiapan kondisi darurat; Simulasi pemadaman alat kebakaran, simulasi jika terjadi gempa atau longsor sebagai bagian dari risiko yang harus dipertimbangkan, simulasi P3K.

SIMPULAN

Secara umum ketua pengelola Tebing Breksi sangat terbuka terhadap masukan yang diberikan selama proses fasilitasi pembentukan, penerapan hingga pengembangan SMK3. Untuk program K3 yang belum berjalan dapat diagendakan sebagai program prioritas pada tahun 2021. Diharapkan keberlanjutan SMK3 pasca pengabdian dan menjadikan K3 sebagai budaya kerja dalam pemberian pelayanan wisata kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami tujukan

kepada Rektor Universitas Ahmad Dahlan dan ketua LPPM, dekan dan Kaprodi, Ketua pengelola Tebing Breksi dan tim yang sangat kooperatif selama pelaksanaan kerja sama tridharma perguruan tinggi sejak tahun 2018-sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bae, So Young, and Po Ju Chang. 2020. "The Effect of Coronavirus Disease-19 (COVID-19) Risk Perception on Behavioural Intention towards 'Untact' Tourism in South Korea during the First Wave of the Pandemic (10 March 2020)." *Current Issues in Tourism* 0(0): 1-19. <https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1798895>.
- Gössling, Stefan, Daniel Scott, and C. Michael Hall. 2020. "Pandemics, Tourism and Global Change: A Rapid Assessment of COVID-19." *Journal of Sustainable Tourism* 29(1): 1-20. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708>.
- Green, Lawrence, and Andersen CL. 1982. *Community Health*. 4th ed. St Louis: Mosby.
- Konradus, Danggur. 2006. *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja; Membangun SDM Pekerja Yang Sehat, Produktif Dan Kompetitif*. 1st ed. ed. Pieter Sambut. Jakarta: Litbang Danggur and Partners.
- "Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 Tentang SMK3."
- Permenaker nomor 4 tahun 1987. 1987. *Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja*.
- Sukapto P, Djojusubroto H. 2013. *Penerapan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Untuk Studi Kasus Pada Industri Tekstil Di Bandung*.
- Tiwari, Pinaz, Hugues Séraphin, and Nimit R. Chowdhary. 2020. "Impacts of

COVID-19 on Tourism Education:
Analysis and Perspectives.” *Journal of
Teaching in Travel and Tourism*
00(00): 1–26.

<https://doi.org/10.1080/15313220.2020.1850392>.

⁹
Undang-Undang No. 1 Tahun 1970
Tentang Keselamatan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun
2012 tentang pelaksanaan Sistem
Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja

HASIL CEK_PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN SISTIM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DI DESTINASI WISATA TAMAN TEBING BREKSI, D.I. YOGYAKARTA(1)

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	safetypurpose.wordpress.com Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Student Paper	2%
3	healthsafetyprotection.com Internet Source	1%
4	text-id.123dok.com Internet Source	1%
5	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	1%
6	finnlandchaniago.blogspot.com Internet Source	1%
7	spsibekasi.org Internet Source	1%

kiyyan.blogspot.com

8

Internet Source

1%

9

Submitted to Universitas International Batam

Student Paper

1%

10

Submitted to Karabük Üniversitesi

Student Paper

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On